



## Menurunnya Kepercayaan Publik akibat Krisis Etika Politik di Pemerintahan Indonesia

Asti Dwi Khoirunisa<sup>1</sup>, Aliga Adelia Zahra<sup>2</sup>, Amanda Rosa<sup>3</sup>, Rudi Santoso<sup>4</sup>,  
<sup>1234</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia.

Email Korespondensi: [astii7654@gmail.com](mailto:astii7654@gmail.com); [aligaadeliaz07@gmail.com](mailto:aligaadeliaz07@gmail.com);  
[amandars150307@gmail.com](mailto:amandars150307@gmail.com); [rudisantoso@radenintan.ac.id](mailto:rudisantoso@radenintan.ac.id)

**Abstract.** *The crisis of political ethics undermines good governance and state-society relations. Unethical behavior by public officials creates disillusionment, political apathy, and skepticism toward policies. This crisis is structural in nature, affecting institutional legitimacy. Addressing it requires bureaucratic cultural reform, political education, and transparency and accountability, in order to restore public trust and strengthen governance. The purpose of this study is to identify and analyze the causes of the decline in public trust due to the crisis of political ethics in the Indonesian government. The method/approach used in this study is a qualitative, empirical-juridical research method. Data collection in this study was conducted through interviews. The results of this study can be concluded that the decline in public trust in political parties and government institutions in Indonesia after the reform era has had a significant impact on political participation and the effectiveness of public programs. The crisis of political ethics is triggered by corruption, abuse of power, weak transparency and accountability, as well as conflicts of interest and nepotism. As a result, the public becomes skeptical, apathetic, and reluctant to participate in elections, public consultations, and government programs. Strategies to restore trust include strengthening official ethics, implementing a code of ethics, increasing transparency and accountability, public participation, and improving the quality of public services. Consistent implementation of these steps is expected to restore public trust, strengthen government legitimacy, increase citizen participation, and ensure political stability and the effectiveness of public policies.*

**Keywords:** Public Trust, Political Ethics Crisis.

**Abstrak.** Krisis etika politik melemahkan good governance dan hubungan negara-masyarakat. Ketidaketisan pejabat publik menimbulkan disilusi, apatisisme politik, dan skeptisisme terhadap kebijakan. Krisis ini bersifat struktural, memengaruhi legitimasi institusi. Penanganannya memerlukan reformasi budaya birokrasi, pendidikan politik, serta transparansi dan akuntabilitas, guna memulihkan kepercayaan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyebab menurunnya kepercayaan publik akibat krisis etika politik di pemerintahan Indonesia. Metoda/pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik dan institusi pemerintah di Indonesia pasca-era reformasi berdampak signifikan pada partisipasi politik dan efektivitas program publik. Krisis etika politik dipicu oleh korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya transparansi dan akuntabilitas, serta konflik kepentingan dan nepotisme. Akibatnya, masyarakat menjadi skeptis, apatis, dan enggan berpartisipasi dalam pemilu, konsultasi publik, maupun program pemerintah. Strategi pemulihan kepercayaan mencakup penguatan etika pejabat, penerapan kode etik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, partisipasi publik, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Implementasi langkah-langkah ini secara konsisten diharapkan memulihkan kepercayaan masyarakat, memperkuat legitimasi pemerintah, meningkatkan partisipasi warga, dan memastikan stabilitas politik serta efektivitas kebijakan publik.

**Kata Kunci:** Kepercayaan Publik, Krisis Etika Politik.

### LATAR BELAKANG

Kepercayaan publik merupakan kemauan serta komitmen masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, untuk memberikan keyakinan kepada pemerintah terkait

legitimasi kewenangan yang dimilikinya dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan publik. Kepercayaan ini tidak hanya mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap integritas pejabat publik, tetapi juga berkaitan erat dengan persepsi mereka terhadap efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penyelenggaraan birokrasi pemerintahan, kepercayaan publik menjadi faktor fundamental yang menentukan keberhasilan pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik sering kali dianggap sebagai indikator langsung dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena pelayanan yang profesional, responsif, dan adil akan memperkuat persepsi masyarakat terhadap legitimasi institusi. Dengan demikian, pembangunan dan pemeliharaan kepercayaan publik bukan sekadar tujuan normatif, tetapi merupakan fondasi strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif psikologi, kepercayaan dipahami sebagai suatu proses kognitif internal yang terjadi pada individu, baik ketika seseorang memberikan kepercayaan kepada pihak lain maupun ketika menerima kepercayaan tersebut. Proses ini mencakup evaluasi terhadap karakter, kompetensi, dan niat pihak lain, sehingga keputusan untuk mempercayai tidak bersifat otomatis, melainkan melalui pertimbangan yang kompleks. Fenomena kepercayaan kerap dijelaskan melalui berbagai istilah seperti *confidence*, *reliability*, dan *trustworthiness*, yang penggunaannya dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan disiplin ilmu yang mengkajinya. Variasi terminologi ini merupakan hal yang wajar, mengingat konsep kepercayaan, khususnya kepercayaan publik, bersifat multidimensional dan melibatkan interaksi sosial, norma, nilai, serta pengalaman individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai kepercayaan publik tidak dapat dibatasi pada satu bidang saja. Pendekatan multidisipliner menjadi sangat penting, dengan perspektif psikologi yang menekankan proses internal dan motivasi individu; perspektif sosiologi yang melihat hubungan sosial dan struktur komunitas; perspektif politik yang menyoroti legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan; perspektif ekonomi yang menelaah konsekuensi kepercayaan terhadap transaksi dan efisiensi pasar; serta perspektif administrasi publik yang mengaitkannya dengan efektivitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan memahami kepercayaan publik secara komprehensif dari berbagai sudut pandang, pemerintah dan masyarakat dapat membangun mekanisme interaksi yang lebih sehat, berkelanjutan, dan saling menguntungkan.

Kepercayaan publik merupakan elemen yang sangat penting karena berperan sebagai faktor penunjang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam proses pengelolaan negara, pemerintah tidak hanya membutuhkan struktur birokrasi yang kuat, tetapi juga memerlukan hubungan yang konstruktif dan harmonis dengan masyarakat. Hubungan ini menjadi dasar bagi terciptanya rasa saling percaya antara pemerintah dan warga negara, yang pada gilirannya memungkinkan pelaksanaan fungsi dan kegiatan pemerintahan berjalan dengan lebih efisien, transparan,

dan akuntabel. Selain itu, tingginya tingkat kepercayaan publik memiliki dampak yang signifikan terhadap legitimasi pemerintah. Pemerintah yang dipercaya oleh masyarakat akan lebih mudah mendapatkan dukungan terhadap berbagai kebijakan dan program pembangunan, sehingga kebijakan yang diterapkan cenderung lebih berhasil dan berkelanjutan. Kepercayaan publik juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek pemerintahan, seperti pengawasan pelaksanaan kebijakan, pemberian masukan strategis, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial dan pembangunan lokal. Dengan demikian, membangun dan mempertahankan kepercayaan publik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Pelayanan publik merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam memenuhi berbagai kepentingan hidup sehari-hari, mulai dari kebutuhan administratif, pendidikan, kesehatan, hingga akses terhadap fasilitas umum. Pada dasarnya, masyarakat senantiasa membutuhkan layanan yang bersifat berkelanjutan dan dapat diandalkan dari pemerintah, karena pelayanan publik menjadi salah satu indikator kualitas pemerintahan serta sarana utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini mencakup penyediaan barang, jasa, dan/atau layanan administratif oleh penyelenggara pelayanan publik kepada setiap warga negara dan penduduk, dengan tujuan memberikan kemudahan, kecepatan, keadilan, keamanan, dan kenyamanan dalam memperoleh hak-hak publik mereka. Pelayanan publik yang efektif tidak hanya memenuhi standar prosedur, tetapi juga memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional.

Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik cenderung meningkat ketika masyarakat menerima pelayanan yang berkualitas, profesional, responsif, dan mampu memenuhi harapan serta kebutuhan mereka secara tepat waktu. Pelayanan yang efektif tidak hanya menyelesaikan masalah secara teknis, tetapi juga memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga tercipta rasa percaya dan kepuasan. Sebaliknya, pelayanan yang lamban, tidak transparan, atau kurang memadai berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik, bahkan dapat menimbulkan skeptisisme terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi indikator utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik. Kepuasan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas administratif, tetapi juga menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjalin komunikasi, menjamin akuntabilitas, dan memenuhi hak-hak warga negara. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas

pelayanan publik harus menjadi prioritas strategis, karena pelayanan yang baik berfungsi sebagai jembatan untuk memperkuat legitimasi pemerintah, mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif.

Krisis etika politik merupakan isu yang sangat krusial karena tidak hanya mencederai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), tetapi juga secara langsung memperlemah hubungan antara negara dan masyarakat. Ketika pejabat publik gagal menunjukkan perilaku etis, transparan, dan akuntabel, masyarakat cenderung mengalami disilusi terhadap sistem politik yang ada. Disilusi ini berpotensi memicu apatisme politik, menurunnya partisipasi publik dalam proses demokrasi, serta meningkatnya sikap skeptisisme terhadap kebijakan pemerintah. Di Indonesia, berbagai kasus yang melibatkan aktor-aktor politik telah memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap integritas pemerintahan. Pemberitaan media yang masif, ditambah dengan kemudahan akses informasi di era digital, turut mempercepat penyebaran isu-isu tersebut, sehingga membentuk opini publik yang semakin kritis. Namun, percepatan informasi juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan yang berlebihan jika masyarakat tidak mampu membedakan antara fakta, opini, dan hoaks. Dalam konteks ini, krisis etika politik tidak hanya menjadi persoalan individu atau kelompok tertentu, melainkan telah berkembang menjadi masalah struktural yang memengaruhi citra dan legitimasi institusi pemerintahan secara luas. Akibatnya, upaya perbaikan tidak dapat hanya berfokus pada penegakan hukum atau sanksi terhadap pelanggaran individu, tetapi juga harus melibatkan reformasi budaya birokrasi, pendidikan politik masyarakat, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas institusi publik. Dengan demikian, penanganan krisis etika politik menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik, memperkuat legitimasi pemerintah, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih berkelanjutan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui kegiatan penelitian lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan ini menggabungkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan penelitian empiris mengenai praktik hukum yang terjadi di masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, penelitian berupaya mengkaji penyebab menurunnya kepercayaan publik akibat krisis etika politik di pemerintahan Indonesia dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi kasus yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan observasi. Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur kepada informan yang dianggap memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang mendalam mengenai pemahaman, pengalaman, serta pandangan para informan terkait menurunnya kepercayaan publik akibat krisis etika politik di pemerintahan Indonesia. Selain wawancara, observasi juga dilakukan dengan mengamati secara langsung berbagai aktivitas dan fenomena yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Melalui observasi tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi yang terjadi di lapangan sehingga data yang diperoleh menjadi lebih komprehensif.

Analisis data dalam penelitian yuridis empiris ini dilakukan secara kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu diklasifikasikan serta dikelompokkan berdasarkan tema atau variabel penelitian. Setelah itu, data yang relevan dipilih dan diringkas untuk mempermudah proses pengolahan. Selanjutnya, data dianalisis dengan menghubungkan temuan empiris yang diperoleh di lapangan dengan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses analisis tersebut dilakukan secara mendalam agar dapat menghasilkan interpretasi yang komprehensif mengenai menurunnya kepercayaan publik akibat krisis etika politik di pemerintahan Indonesia. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian sekaligus menunjukkan keterkaitan antara fakta empiris dengan aspek normatif hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penurunan Kepercayaan Publik di Indonesia**

Menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia menjadi fenomena yang berdampak luas terhadap budaya politik nasional, terutama setelah era reformasi. Transformasi sistem kekuasaan dari pola “orang mencari kekuasaan” menjadi “kekuasaan mencari orang” menunjukkan bahwa kontestasi politik kini berlangsung secara terbuka, namun sering kali sarat manipulasi dan strategi pragmatis. Dalam praktiknya, proses perolehan kekuasaan cenderung mengandalkan pencitraan politik semu, pendekatan transaksional, serta kepentingan pribadi atau kelompok elit yang kadang lebih diutamakan dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Situasi ini menimbulkan persepsi bahwa politik tidak adil dan tidak berpihak pada publik, sehingga legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan terhadap partai politik terus tergerus. Fenomena rendahnya kepercayaan publik ini memiliki dampak multidimensional. Masyarakat yang skeptis cenderung bersikap apatis, mengurangi partisipasi dalam pemilu, konsultasi publik, maupun program pemerintah, sehingga kontrol sosial terhadap praktik politik yang tidak etis melemah. Selain itu, rendahnya kepercayaan memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik, karena masyarakat ragu terhadap niat dan integritas

pejabat publik. Media massa dan media sosial turut memperkuat persepsi negatif ini, mempercepat penyebaran kritik, opini, dan informasi yang dapat memengaruhi sikap publik secara luas. Dalam konteks ini, pemulihan kepercayaan publik menjadi sangat penting. Strategi pemulihan tidak hanya mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran individu, tetapi juga reformasi budaya birokrasi, penguatan transparansi dan akuntabilitas, pendidikan politik masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan pendekatan yang komprehensif, pemerintah dapat membangun kembali legitimasi partai politik dan institusi publik, mendorong partisipasi warga, dan menciptakan budaya politik yang sehat, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Penurunan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah di Indonesia merupakan salah satu dampak paling nyata dari krisis etika politik, lemahnya transparansi, dan praktik birokrasi yang kurang profesional. Fenomena ini tidak hanya bersifat perseptual, tetapi memiliki implikasi nyata terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi kebijakan publik. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap integritas pejabat publik dan kualitas layanan pemerintah, dukungan serta partisipasi aktif warga dalam program dan kebijakan pemerintah cenderung menurun. Hal ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan, mengurangi efektivitas program pemerintah, dan menimbulkan kesenjangan antara kebijakan yang dirancang secara normatif dengan implementasi nyata di lapangan. Dampak lain dari menurunnya kepercayaan publik adalah meningkatnya risiko ketidakstabilan sosial. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dapat memicu protes sosial, kritik publik yang masif, dan penyebaran opini negatif melalui media sosial maupun media konvensional. Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan melemahkan legitimasi politik, yang menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Legitimasi yang terganggu membuat pemerintah lebih sulit memperoleh dukungan publik untuk kebijakan strategis, sementara masyarakat menjadi apatis atau skeptis terhadap proses politik dan birokrasi, sehingga kontrol sosial terhadap penyalahgunaan kekuasaan melemah. Lebih jauh, penurunan kepercayaan publik juga berdampak pada citra institusi pemerintah secara keseluruhan. Masyarakat cenderung menilai kinerja pemerintah bukan hanya berdasarkan hasil kebijakan, tetapi juga melalui persepsi mengenai integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur. Praktik korupsi, nepotisme, dan konflik kepentingan yang kerap muncul dalam birokrasi memperkuat persepsi negatif masyarakat, sehingga memunculkan sikap skeptisisme yang sulit dipulihkan. Akibatnya, efektivitas prosedur pelayanan publik menjadi menurun, kualitas layanan tidak memenuhi harapan masyarakat, dan potensi partisipasi warga dalam proses demokrasi serta program pembangunan berkurang. Untuk mengatasi fenomena ini, diperlukan strategi pemulihan kepercayaan yang komprehensif. Reformasi birokrasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan kode etik, pelatihan aparatur pemerintah, serta pelibatan

masyarakat secara aktif dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik merupakan langkah-langkah strategis yang dapat membangun kembali kepercayaan publik (Rahmaniaa et al., 2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Survei nasional dan kajian terdahulu menegaskan bahwa masyarakat semakin skeptis terhadap integritas pejabat publik, transparansi dalam pengambilan kebijakan, dan kualitas pelayanan publik. Penurunan kepercayaan ini terutama dipicu oleh persepsi masyarakat terhadap praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan nepotisme yang masih marak terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan. Fenomena ini memperkuat keyakinan publik bahwa kepentingan pribadi atau kelompok elit politik sering diutamakan dibandingkan kepentingan masyarakat secara umum. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan organisasi non-pemerintah mengungkapkan kekecewaan warga terhadap perilaku pejabat publik yang tidak selalu menjalankan tugasnya secara profesional serta kurang mematuhi etika politik yang berlaku. Lemahnya akuntabilitas dan keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan politik turut memperburuk persepsi negatif ini. Banyak warga merasa dijauhkan dari mekanisme pembuatan kebijakan, mulai dari alokasi anggaran, seleksi dan pengangkatan pejabat, hingga pelaksanaan program pemerintah. Ketidakjelasan informasi dan keterbatasan akses publik membuat masyarakat sulit menilai sejauh mana pemerintah menggunakan kewenangannya secara adil, benar, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

### **Faktor Penyebab Krisis Etika Politik**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan buruknya pelayanan publik di Indonesia. Salah satu faktor yang paling menonjol adalah adanya kebijakan yang cenderung berpihak kepada elit politik dibandingkan kepentingan masyarakat secara luas. Berbagai kebijakan dan keputusan publik sering kali lebih menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki kekuatan politik, sementara kebutuhan masyarakat umum kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Kondisi ini dapat terlihat dari prioritas penggunaan anggaran, pelaksanaan program pembangunan, serta distribusi sumber daya yang lebih diarahkan untuk memperkuat posisi politik individu atau kelompok tertentu. Akibatnya, masyarakat memandang bahwa pemerintah tidak sepenuhnya menjalankan fungsi pelayanan publik secara adil dan merata. Persepsi tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memunculkan sikap skeptis terhadap berbagai kebijakan yang diambil. Selain itu, pendekatan kelembagaan yang terlalu menekankan aspek teknis dan prosedural juga menjadi penyebab rendahnya kualitas pelayanan publik. Dalam banyak kasus, birokrasi lebih berfokus pada pemenuhan prosedur administratif dibandingkan pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat. Pelayanan publik sering kali dijalankan secara formalistik, kaku, dan kurang memperhatikan aspek kemanusiaan.

Akibatnya, masyarakat merasa tidak mendapatkan pelayanan yang nyaman, responsif, dan sesuai dengan harapan mereka. Kondisi tersebut memperkuat persepsi bahwa birokrasi lebih berorientasi pada kepentingan internal lembaga daripada kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Kurangnya integrasi antara kebijakan, prosedur, dan kebutuhan masyarakat juga menjadi salah satu penyebab utama rendahnya efektivitas pelayanan publik. Banyak kebijakan yang dirumuskan tanpa didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat maupun kondisi lapangan yang sebenarnya. Akibatnya, prosedur pelayanan menjadi terlalu rumit, kaku, dan sulit diakses oleh masyarakat. Persyaratan administrasi yang berlebihan, proses birokrasi yang panjang, serta waktu pelayanan yang lama sering kali menimbulkan ketidakpuasan dan frustrasi di kalangan masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat akses terhadap layanan publik, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di samping itu, minimnya pengawasan dan akuntabilitas publik turut memperburuk kualitas pelayanan publik. Lemahnya kontrol dari masyarakat maupun lembaga independen menyebabkan berbagai penyimpangan birokrasi sulit terdeteksi dan ditindak secara efektif. Situasi ini membuka peluang bagi praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan pengabaian tanggung jawab oleh aparatur pemerintah. Ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan dengan baik, kualitas pelayanan publik cenderung menurun dan masyarakat merasa tidak memperoleh hak-haknya secara optimal.

Praktik konflik kepentingan dan nepotisme juga menjadi faktor yang memperkuat krisis etika politik. Masyarakat sering melihat adanya kecenderungan pejabat publik untuk mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Fenomena tersebut menciptakan persepsi bahwa pemerintahan tidak dijalankan secara adil dan transparan. Ketika masyarakat melihat bahwa proses pengangkatan pejabat, distribusi sumber daya, maupun pelaksanaan proyek pemerintah lebih didasarkan pada kedekatan politik daripada kompetensi, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah akan semakin menurun. Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa buruknya pelayanan publik dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan permasalahan yang kompleks dan saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang menyeluruh melalui penguatan integritas birokrasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pemberantasan korupsi, penguatan pengawasan publik, peningkatan profesionalisme aparatur, serta pengembangan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipulihkan secara berkelanjutan.

### **Dampak Penurunan Kepercayaan Publik**

Penurunan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah memiliki konsekuensi yang luas bagi dinamika politik dan sosial di Indonesia. Salah satu dampak paling nyata adalah menurunnya partisipasi publik dalam proses demokrasi dan pengawasan terhadap pemerintah. Ketika masyarakat menjadi skeptis terhadap integritas dan kinerja pejabat publik, mereka cenderung apatis dan enggan terlibat dalam aktivitas politik maupun sosial. Kondisi ini berdampak ganda. Pertama, partisipasi masyarakat yang menurun melemahkan legitimasi keputusan politik dan program pemerintah, karena pengambilan kebijakan menjadi kurang terkontrol oleh aspirasi dan kebutuhan rakyat. Kedua, kontrol sosial terhadap penyalahgunaan kekuasaan ikut melemah. Tanpa pengawasan aktif dari publik, praktik korupsi, politik transaksional, dan penyimpangan birokrasi lebih mudah terjadi dan bertahan, sehingga kualitas pelayanan publik tetap rendah. Selain itu, rendahnya kepercayaan publik menciptakan sikap pasrah (“nrimo”) di masyarakat, yang memperparah budaya politik yang kurang kritis. Masyarakat yang apatis tidak menuntut transparansi atau akuntabilitas, sehingga pejabat publik yang tidak profesional atau mementingkan kepentingan pribadi sulit ditekan untuk memperbaiki kinerja. Secara keseluruhan, penurunan kepercayaan publik mengganggu siklus demokrasi yang sehat, melemahkan pengawasan publik, dan menimbulkan risiko sistemik bagi kualitas tata kelola pemerintahan.

Penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah memiliki berbagai implikasi negatif yang dapat memengaruhi stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, serta kualitas demokrasi. Salah satu dampak yang paling nyata adalah menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat. Ketika kepercayaan terhadap pemerintah berada pada tingkat yang rendah, masyarakat cenderung menunjukkan sikap apatis terhadap berbagai proses politik dan penyelenggaraan pemerintahan. Hasil wawancara dengan sejumlah narasumber menunjukkan bahwa sebagian warga enggan terlibat dalam pemilihan umum, konsultasi publik, forum musyawarah, maupun berbagai program pemerintah lainnya karena mereka merasa bahwa aspirasi, kebutuhan, dan pendapat yang disampaikan tidak memperoleh perhatian yang memadai dari pemerintah. Kondisi ini menyebabkan menurunnya keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi dan secara tidak langsung melemahkan legitimasi politik pemerintah.

Rendahnya partisipasi politik juga berdampak pada berkurangnya dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Selain itu, kondisi tersebut dapat membuka peluang munculnya praktik-praktik politik yang kurang transparan dan akuntabel karena kontrol sosial dari masyarakat menjadi semakin lemah. Ketika masyarakat tidak aktif mengawasi jalannya pemerintahan, penyelenggara negara berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip integritas, akuntabilitas, dan keterbukaan. Dampak lainnya adalah menurunnya kualitas pelayanan publik karena kurangnya dorongan dari masyarakat untuk melakukan perbaikan dan inovasi dalam pelayanan. Oleh sebab itu, upaya membangun kembali kepercayaan publik menjadi sangat penting agar masyarakat terdorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam

berbagai proses demokrasi dan pembangunan. Pemerintah perlu menghadirkan pelayanan yang transparan, akuntabel, responsif, dan partisipatif sehingga masyarakat merasa bahwa suara dan kepentingan mereka benar-benar diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan.

Selain berdampak pada partisipasi politik, rendahnya kepercayaan publik juga berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan publik. Data lapangan menunjukkan bahwa berbagai program pemerintah sering kali tidak memperoleh dukungan penuh dari masyarakat karena adanya keraguan terhadap niat, integritas, maupun kemampuan pemerintah dalam menjalankan program tersebut secara adil dan transparan. Program pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi sosial, maupun layanan dasar lainnya terkadang mengalami hambatan dalam implementasinya karena masyarakat kurang percaya terhadap manfaat dan tujuan yang ingin dicapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik merupakan faktor strategis yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

### **Peran Pelayanan Publik dalam Memulihkan Kepercayaan**

Menurunnya kepercayaan publik akibat krisis etika politik di pemerintahan Indonesia menuntut langkah-langkah konkret dan sistematis dari pemerintah untuk memperbaiki integritas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Salah satu aspek krusial adalah penegakan hukum yang adil, tegas, dan tidak pandang bulu, karena hal ini menjadi fondasi utama bagi pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum serta birokrasi secara keseluruhan. Tanpa adanya kepastian hukum dan keadilan yang nyata, upaya memperbaiki citra pemerintah akan sulit membuahkan hasil yang signifikan. Pelayanan publik yang transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat dapat menjadi sarana strategis untuk membangun kembali legitimasi pemerintah. Dengan memastikan bahwa prosedur pelayanan dijalankan secara konsisten dan objektif bebas dari intervensi politik, praktik transaksional, atau diskriminasi masyarakat akan melihat adanya komitmen nyata pemerintah untuk menegakkan prinsip keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan bersama. Perbaikan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan terhadap institusi publik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam pengawasan, evaluasi, dan penyusunan kebijakan publik. Lebih jauh, ketika masyarakat merasakan keadilan, efektivitas, dan kualitas dalam layanan publik, sikap skeptis dan apatisisme politik dapat berkurang secara signifikan. Hal ini memperkuat kontrol sosial terhadap penyalahgunaan kekuasaan, menumbuhkan budaya politik yang sehat, dan menjaga stabilitas politik serta keberlanjutan pembangunan nasional. Dengan demikian, pelayanan publik yang berorientasi pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas bukan sekadar mekanisme administratif, tetapi menjadi instrumen vital untuk memulihkan kepercayaan publik yang terkikis akibat krisis etika politik, sekaligus memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. (Sabana et al., 2025)

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan salah satu faktor krusial dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat cenderung memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi ketika pelayanan publik diselenggarakan secara transparan, cepat, akurat, dan profesional. Kualitas pelayanan publik tidak hanya mencakup kecepatan dan ketepatan layanan, tetapi juga mencerminkan integritas, kompetensi, dan akuntabilitas aparatur pemerintah. Sebagai contoh, implementasi program administrasi publik yang memanfaatkan sistem digitalisasi dan teknologi informasi telah menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Dengan adanya digitalisasi, warga dapat mengakses informasi terkait layanan publik secara lebih mudah dan cepat, prosedur administratif menjadi lebih sederhana, dan risiko praktik pungutan liar atau intervensi aparat berkurang. Keberadaan mekanisme pelayanan yang efisien dan transparan ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam memperoleh layanan, tetapi juga memperkuat persepsi bahwa pemerintah mampu menjalankan fungsi publik dengan profesionalisme dan integritas. Selain itu, kualitas pelayanan publik yang baik mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan. Masyarakat yang merasakan pelayanan yang responsif dan akuntabel lebih cenderung mendukung kebijakan pemerintah dan terlibat dalam pengawasan program publik. Dengan kata lain, pelayanan publik yang berkualitas bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif warga, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis untuk memperbaiki citra pemerintah, memulihkan kepercayaan publik, dan meningkatkan legitimasi institusi pemerintahan di mata masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menempatkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu prioritas utama, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, kecepatan layanan, serta profesionalisme aparatur. Langkah-langkah ini diyakini mampu menjadi sarana efektif untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat, mengurangi skeptisisme, dan memperkuat dukungan publik terhadap program serta kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.

### **Analisis Teori dan Perspektif Multidisipliner**

Menurunnya kepercayaan publik akibat krisis etika politik di pemerintahan Indonesia dapat dianalisis secara lebih komprehensif melalui perspektif administrasi publik. Administrasi publik sejatinya tidak hanya berfokus pada manajemen dan penyelenggaraan layanan, tetapi juga merupakan bagian dari ilmu kenegaraan, pemerintahan, dan administrasi negara. Dengan kata lain, administrasi publik berada di persimpangan antara teori politik dan praktik pemerintahan. Sebagai ilmu multidisipliner, administrasi publik memungkinkan pemahaman yang menyeluruh terhadap bagaimana kebijakan dibuat, diimplementasikan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks krisis etika politik, administrasi publik berperan sebagai instrumen yang dapat menilai integritas birokrasi, efektivitas prosedur, serta keadilan dalam pelayanan publik. Hal ini penting karena kepercayaan publik tidak hanya dipengaruhi oleh hasil kebijakan, tetapi juga oleh cara kebijakan tersebut dijalankan secara administratif dan politis.

Pendekatan multidisipliner ini menggabungkan pengetahuan dari ilmu politik, hukum, sosiologi, dan manajemen publik. Misalnya Ilmu politik menganalisis bagaimana konflik kepentingan elit politik dan praktik pragmatisme merusak legitimasi pemerintah; Hukum dan etika publik menekankan prinsip penegakan hukum yang adil, transparansi, dan akuntabilitas; Sosiologi dan psikologi sosial membantu memahami respons masyarakat, seperti skeptisisme, apatisme, atau kelelahan politik (*political fatigue*); Manajemen dan administrasi publik menilai kapasitas kelembagaan, prosedur layanan, dan praktik birokrasi dalam memulihkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, menurunnya kepercayaan publik akibat krisis etika politik bukan hanya masalah moral atau politik semata, tetapi juga persoalan administratif yang kompleks, yang menuntut analisis dan solusi dari perspektif multidisipliner. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan strategi pemulihan kepercayaan publik yang lebih holistik, mulai dari perbaikan prosedur layanan, reformasi birokrasi, hingga penguatan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori politik klasik yang dikemukakan oleh Easton tahun 1965, yang menekankan bahwa kepercayaan publik merupakan fondasi utama legitimasi pemerintahan. Menurunnya kepercayaan publik akibat krisis etika politik menunjukkan bahwa integritas individu pejabat publik dan kualitas institusi saling memengaruhi persepsi masyarakat. Pendekatan multidisipliner yang menggabungkan psikologi politik, sosiologi, dan administrasi publik menjelaskan mengapa persepsi masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas pejabat menjadi indikator utama tingkat kepercayaan publik. Psikologi politik menekankan bahwa persepsi individu terhadap kejujuran, kompetensi, dan tanggung jawab pejabat memengaruhi kepercayaan kolektif. Sementara administrasi publik menunjukkan bahwa prosedur pelayanan yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepuasan publik dan menumbuhkan kepercayaan.

### **Strategi Pemulihan Kepercayaan Publik**

Strategi pemulihan kepercayaan publik menjadi langkah penting yang harus dilakukan pemerintah ketika terjadi krisis etika politik yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Pemulihan tersebut perlu dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan tingkat keparahan krisis, karakteristik masyarakat, serta kondisi sosial dan politik yang berkembang. Melalui strategi yang tepat, pemerintah tidak hanya mampu mengatasi dampak krisis dalam jangka pendek, tetapi juga dapat membangun kembali fondasi pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penerapan strategi pemulihan secara konsisten dan berkelanjutan akan menghasilkan berbagai dampak positif bagi kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Masyarakat akan semakin percaya bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk memperbaiki kesalahan, menegakkan keadilan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada saat yang sama, tingkat skeptisisme dan apatisme masyarakat

terhadap pemerintah dapat berkurang, sementara partisipasi publik dalam proses demokrasi akan semakin meningkat. Kondisi tersebut pada akhirnya akan mendukung terciptanya stabilitas politik, memperkuat legitimasi pemerintahan, serta meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah dan Masyarakat. Berdasarkan temuan lapangan, salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk memulihkan kepercayaan publik adalah penguatan etika dan integritas pejabat publik. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan etika secara berkelanjutan, penerapan kode etik yang jelas dan tegas, serta pemberian sanksi yang konsisten terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Penguatan etika tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur mengenai tanggung jawab publik, tetapi juga membangun budaya kerja yang profesional, jujur, dan akuntabel. Dengan adanya integritas yang kuat dalam birokrasi, potensi terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat.

## **KESIMPULAN**

Menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan budaya politik, terutama pada era pascareformasi. Perubahan sistem politik yang sebelumnya lebih banyak ditentukan oleh individu yang mencari kekuasaan menjadi kondisi di mana kekuasaan justru mencari individu tertentu menunjukkan adanya transformasi dalam pola kontestasi politik. Dalam praktiknya, proses politik sering kali berlangsung secara terbuka, tetapi tidak jarang disertai dengan berbagai bentuk manipulasi yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Kondisi ini menyebabkan semakin melemahnya keyakinan publik terhadap kemampuan partai politik dalam menjalankan fungsi representasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara objektif.

Krisis etika politik di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Salah satu faktor yang paling dominan adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat publik yang memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Praktik semacam ini menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik mengalami penurunan yang cukup signifikan. Selain korupsi, lemahnya transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor yang memperburuk krisis etika politik. Kurangnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta minimnya akses masyarakat terhadap informasi publik menyebabkan munculnya berbagai kecurigaan dan persepsi negatif terhadap institusi pemerintahan. Banyak masyarakat merasa kesulitan memperoleh informasi yang

jelas mengenai penggunaan anggaran, pelaksanaan program pemerintah, maupun proses seleksi dan pengangkatan pejabat publik. Kondisi tersebut memunculkan anggapan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menjalankan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penurunan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah membawa konsekuensi yang luas terhadap kehidupan politik dan sosial masyarakat Indonesia. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, baik dalam bentuk keterlibatan politik maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap integritas dan kinerja pejabat publik, mereka cenderung bersikap apatis dan enggan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik. Kondisi ini dapat melemahkan kualitas demokrasi karena partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurunnya kepercayaan publik akibat krisis etika politik juga menuntut pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dan sistematis dalam memperbaiki integritas, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik. Salah satu aspek yang sangat penting adalah penegakan hukum yang adil, tegas, dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum yang konsisten akan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas berbagai bentuk pelanggaran etika dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya kepastian hukum yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, kepercayaan terhadap institusi negara dan aparat penegak hukum dapat dipulihkan secara bertahap.

Terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu strategi yang paling penting adalah penguatan etika dan integritas pejabat publik. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan etika bagi aparatur pemerintah, penerapan kode etik yang jelas dan tegas, serta pemberian sanksi yang konsisten terhadap setiap pelanggaran etika. Langkah tersebut tidak hanya meningkatkan pemahaman aparatur mengenai nilai-nilai etika publik, tetapi juga membangun budaya profesionalisme, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam lingkungan birokrasi. Strategi berikutnya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Pemerintah perlu memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap informasi mengenai kebijakan, penggunaan anggaran, dan laporan pertanggungjawaban kinerja. Keterbukaan informasi akan membantu masyarakat memahami proses pengambilan keputusan serta memungkinkan mereka untuk melakukan pengawasan secara lebih efektif. Dengan demikian, persepsi negatif dan sikap skeptis masyarakat terhadap pemerintah dapat diminimalkan.

Peningkatan partisipasi masyarakat juga menjadi strategi yang sangat penting dalam proses pemulihan kepercayaan publik. Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik memungkinkan aspirasi dan kebutuhan warga dapat terakomodasi secara lebih baik. Selain menghasilkan kebijakan

yang lebih responsif dan relevan, partisipasi masyarakat juga memperkuat rasa memiliki terhadap kebijakan yang dihasilkan sehingga tingkat kepercayaan terhadap pemerintah semakin meningkat. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan langkah nyata yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Pelayanan yang efektif, cepat, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan warga akan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak masyarakat secara profesional. Ketika masyarakat memperoleh pelayanan yang baik dan berkualitas, mereka akan memiliki persepsi yang lebih positif terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu instrumen strategis yang dapat digunakan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah dalam jangka panjang.

## **REFERENSI**

- Arifin, A. (2011). *Komunikasi Politik, Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan, Strategi, Dan Komunikasi Politik Indonesia*. Graha Ilmu.
- Daryanto, & Setyobudi, I. (2014). *Konsumen dan Pelayanan Prima*. Gava Media.
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Fakhrudin, Asha, L., Sumarto, Warlizasusi, J., Hartini, Saputra, H., Sutarto, Ridwan, R. Bin, Istan, Wanto, D., Sari, D. P., Hajja, D., Azwar, B., Harmi, H., Rini, Iswanto, R., & Ifnaldi. (2021). *Studi Islam Internasional: Kajian dan Pendekatan Multidisipliner*. LP2 IAIN Curup.
- Hanifah, W. (2025). *Pengaruh Kepercayaan Politik Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Magang Di Sekretariat Jenderal DPR RI*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Haning, M. T., Hasniati, & H. Tahili, M. (2020). *Public Trust dalam Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, dan Strategi*. UPT Unhas Press.
- Hardiyansyah. (2017). *Manajemen pelayanan dan Pengembangan Organisasi Publik: Dalam Perpektif Riset Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Gava Media.
- Khayra, N. (2023). *Silih Asah (Saling Mengingat dan Mencerahkan)*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Kurniawan, R. C. (2021). *Buku Ajar Etika Politik Dan Pemerintahan*. Pusaka Media.
- Pasolong, H. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Rahayu, S., & Juwono, V. (2019). *Birokrasi dan Governance: Teori, Konsep, dan Aplikasinya*. Rajawali Press.
- Rahmaniaa, A., Triwulan, D., Maruhawa, T. K., Zulfikar, M. R., Rahmad, Ritonga, A., & Yudha, S. (2025). Fenomena Penurunan Kepercayaan Publik Terhadap Institusi Pemerintahan di Era Post-Truth: Kajian Sosial Politik Kontemporer dengan Perspektif Mahasiswa Ilmu Komunikasi UINSU. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)*, 3(3), 925–929.
- Sabana, S., Situmeang, S. N., Khadijah, S., Damanik, S. A. P., Muhajir, S. Al, Simbolon,

- R. G., & Samosir, K. (2025). Strategi Membangun Kembali Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum di Indonesia: Tinjauan Menuju Tahun 2025. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(2), 1147–1158.
- Soemirat, S., & Ardianto, E. (2010). *Dasar-dasar Public Relation*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Rahmaniaa, Afifah, Dewi Triwulan, Tamara Khaisy Maruhawa, Muhammad Rafli Zulfikar, Rahmad, Alfarizki Ritonga, and Sandy Yudha. “Fenomena Penurunan Kepercayaan Publik Terhadap Institusi Pemerintahan Di Era Post-Truth: Kajian Sosial Politik Kontemporer Dengan Perspektif Mahasiswa Ilmu Komunikasi UINSU.” *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)* 3, no. 3 (2025): 925–29.
- Sabana, Sobri, Sherly Natasya Situmeang, Siti Khadijah, Selvia Andriani Putri Damanik, Shafa Al Muhajir, Ronald Gemsar Simbolon, and Katrina Samosir. “Strategi Membangun Kembali Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia: Tinjauan Menuju Tahun 2025.” *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 4, no. 2 (2025): 1147–58.
- Hanifah, Widya. “Pengaruh Kepercayaan Politik Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Magang Di Sekretariat Jenderal DPR RI.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.